

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya negara memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh akses atas pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gendernya.

Para penyandang disabilitas di Indonesia merupakan warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 5 dalam ayat (1), (2), (3), (4), menuliskan tentang kesamaan hak pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan maupun kondisi geografis. Undang-undang ini semakin menegaskan betapa negara berusaha untuk memberikan pendidikan untuk semua.

Salah satu yang dianggap mampu untuk merealisasikan pendidikan untuk semua tersebut adalah dengan mengembangkan pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan terlepas dari kondisi disabilitasnya. Di Indonesia, keberadaan pendidikan inklusif ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendidikan nasional yang dikenal dengan Permendiknas 70/2009 yang berbunyi:

*”Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.*

Dalam pendidikan inklusif, semua anak memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, tidak heran bila sekolah inklusif dipandang sebagai sekolah yang bisa menjawab kebutuhan akan pendidikan dan pemenuhan hak atas pendidikan sehingga pada akhirnya bisa menciptakan masyarakat yang inklusif. Hal ini sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang beragam suku, budaya dan kepercayaannya. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraannya sendiri pendidikan inklusif ini sering sekali tidak disesuaikan dengan keberagaman ataupun kekayaan lokal yang terdapat dalam satu daerah.

Meskipun aturan penyelenggaraan sekolah inklusif sebagai sekolah yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau yang memiliki hambatan dalam akses pendidikan sudah dibuat, proses pelaksanaannya masih perlu dipelajari dan diupayakan. Sampai saat ini, kebanyakan anak penyandang disabilitas mendapatkan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya di sekolah yang dinamakan Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB sendiri adalah sekolah yang bersifat eksklusif karena anak yang belajar di SLB adalah anak-anak yang jenis disabilitasnya sama dan ini tetap membuat para penyandang disabilitas menjadi orang 'asing' dan 'khusus'. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dengan kehidupan masyarakat sekitarnya (Mujito & dkk, 2014:75). Artinya, kondisi penyandang disabilitas ini dilayani secara eksklusif saja atau memisahkan mereka dan menempatkan yang sejenis ternyata tidak cukup.

Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya tidak bisa hidup sendiri tanpa menjalin relasi dengan orang disekitarnya. Sebagai individu yang juga tinggal ditengah masyarakat yang berbudaya, penyandang disabilitas juga layak untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Karena bagaimanapun juga, keberadaan seorang

penyandang disabilitas tidak bisa ditentukan untuk dimiliki suku atau masyarakat budaya tertentu saja. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir dan suku apa yang ingin kita jadikan sebagai identitas kita karena orangtua kita sudah terlebih dahulu menjadi makhluk budaya dan berasal dari suku tertentu yang pasti akan menurunkan budaya tersebut untuk menjadi identitas kita juga.

Kondisi penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi maupun '*alienisasi*' yang disebabkan disabilitasnya. Munculnya pandangan budaya yang menghubungkan kondisi disabilitas dengan kepercayaan-kepercayaan lain atau mitos yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya tak ayal menyebabkan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Pada suku Batak Toba, ditemukan juga penyandang disabilitas meski sejarah mulai keberadaannya ada dalam lingkungan masyarakat Batak Toba itu sendiri kurang diketahui secara pasti.

Budaya mempengaruhi perkembangan anak melalui penyediaan *setting* yang menciptakan konteks dalam kehidupan sehari-hari (Whiting dalam Dhayaksini dan Yuniardi, 2012:108). Dalam hubungannya dengan disabilitas, seorang anak penyandang disabilitas yang tinggal dalam *setting* budaya yang menghargai dirinya sebagai bagian dari masyarakat budaya, akan mengalami perkembangan sebagai bagian dari masyarakat budaya dimana dia tinggal. Suku Batak Toba memandang bahwa setiap individu yang lahir adalah dari Tuhan sehingga harus diterima keberadaannya dalam rasa syukur dalam kondisi apapun.

Pandangan budaya dapat memberikan pandangan negatif dan positif tentang disabilitas (Groce dalam Haihambo, 2010). Pandangan budaya tersebut mempengaruhi sistem gagasan, konsep-konsep, aturan-aturan serta pemaknaan

yang mendasari perwujudannya dalam proses interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam proses interaksi ini di masyarakat, *stakeholders* merupakan orang yang memberikan pengaruh dalam interaksi tersebut.

Menyadari ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti pandangan para *stakeholders* suku Batak Toba tentang disabilitas. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengarahkan penelitian ini dengan judul “Pandangan *Stakeholders* Pendidikan Suku Batak Toba tentang Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dan Implementasinya di Kabupaten Toba Samosir”.

## **B. Fokus Penelitian**

Pendidikan bagi penyandang disabilitas dewasa ini semakin menjadi isu yang diperhatikan. Beberapa kesepakatan internasional maupun nasional mendorong untuk semakin terselenggarakannya pendidikan yang mampu memberikan layanan pada semua anak. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas di suku Batak Toba di Kabupaten Tobasa sejak tahun 1983 berpusat di kecamatan Sintong Marnipi. Sudah tiga puluh tahun pendidikan bagi penyandang disabilitas diberikan dan sampai saat ini masih ada dua Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kabupaten Tobasa. Satu merupakan sekolah negeri dan satunya lagi sekolah swasta dan keduanya hanya mengakomodasi pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini. Menyadari bahwa dalam proses penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas *Stakeholders* (pemangku kepentingan) pendidikan memiliki peranan aktif untuk membuatnya berhasil. Mereka juga mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat melalui pandangan mereka melalui hasil interaksi sehingga tercipta sebuah pandangan maupun penyelenggaraan akan suatu nilai dalam masyarakat

tersebut. *Stakeholders* pendidikan memiliki peranan yang besar untuk membangun dan menciptakan iklim lingkungan sekolah yang bisa menerima semua anak agar mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan. Dalam penelitian ini, *Stakeholders* pendidikan merujuk kepada kepala dinas, kepala sekolah, kepala yayasan dan guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Tobasa.

Penelitian ini berfokus kepada pandangan para *Stakeholders* pendidikan yang berlatar belakang suku Batak mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini akan menggali pandangan-pandangan mereka sebagai masyarakat suku Batak yang dapat dipengaruhi oleh cerita turun-temurun yang ada di suku Batak, mitos yang tetap berlangsung di masyarakat, pengetahuan baru yang berasal dari faktor luar yang dipengaruhi oleh pendidikan, media komunikasi, agama maupun pandangan-pandangan lain yang menyebabkan stigma atau stereotip yang dibangun dan menjadi pandangan para *Stakeholders* pendidikan suku Batak Toba di Kabupaten Tobasa.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Untuk menjawab fokus penelitian seperti yang telah disebutkan di atas, peneliti menyusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan *Stakeholders* pendidikan suku Batak Toba tentang penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pengetahuan *Stakeholders* pendidikan suku Batak Toba tentang implementasi pendidikan bagi penyandang disabilitas?
3. Apa pandangan *Stakeholders* pendidikan suku Batak Toba terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas berdasarkan perspektif budaya suku Batak Toba yang mereka miliki?

4. Bagaimanakah konsep pendidikan bagi penyandang disabilitas dan implementasinya yang sesuai bagi suku Batak Toba menurut *Stakeholders* pendidikan tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk membantu menemukan bentuk layanan pendidikan yang tepat bagi anak penyandang disabilitas di suku Batak Toba yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan *Stakeholders* pendidikan suku Batak Toba tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Tobasa.
- b. Untuk mengetahui pandangan *Stakeholders* pendidikan suku Batak Toba tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas suku Batak Toba di Kabupaten Tobasa.
- c. Untuk mengetahui implementasi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Tobasa menurut *Stakeholders* pendidikan suku Batak Toba.
- d. Untuk membantu pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Toba Samosir menemukan layanan pendidikan yang tepat bagi anak penyandang disabilitas di suku Batak Toba.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk penelitian tentang disabilitas dan penyandang disabilitas pada suku

Batak Toba secara khusus dan suku-suku lain di Indonesia secara umum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang penyandang disabilitas di suku Batak Toba.
- b. Bagi orangtua yang memiliki anak penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan agar keluarga semakin peduli dengan kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas di suku Batak Toba.
- c. Bagi dinas pendidikan Kabupaten Toba Samosir penelitian ini diharapkan membantu mempercepat dan turut memperkaya penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan kebudayaan suku Batak Toba di Kabupaten Toba Samosir.
- d. Bagi Kementerian Pendidikan, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk menemukan atau merancang layanan pendidikan yang tepat terhadap penyandang disabilitas pada suku Batak Toba dan suku-suku lain di Indonesia.

## **F. Struktur Organisasi Penelitian**

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) BAB. Pada BAB I memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, fokus masalah, manfaat dan tujuan penelitian. BAB II membuat tentang kajian pustaka sementara BAB III memuat tentang metode penelitian, lokasi dan subjek, pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan dan terakhir, BAB V yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Tryastuti Irawati Belliny Manullang, 2014  
*Pandangan Stakeholders Pendidikan Suku Batak Toba tentang Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dan Implementasinya di Kabupaten Toba Samosir*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari fokus penelitian yang sudah dijelaskan diatas, peneliti hendak menjelaskan definisi-definisi yang dipakai sebagai landasan teori untuk penelitian ini.

### **1. Pandangan**

Pandangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adalah pengetahuan, pendapat dan konsep berpikir yang dimiliki oleh golongan masyarakat yang didapat dari pengalaman langsung maupun cerita turun-temurun dalam menanggapi dan menerangkan fenomena yang ada di dalam masyarakat.

### **2. Stakeholders Pendidikan**

Dalam penelitian ini, *Stakeholders* (pemangku kepentingan) adalah orang-orang yang memiliki peranan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan atau terciptanya suatu pandangan dan sikap dan keputusan yang mempengaruhi cara pandang maupun penyelenggaraan suatu nilai di dalam komunitas atau budaya.

*Stakeholders* pendidikan dalam penelitian ini berfokus kepada pemangku kepentingan pendidikan yang melingkupi kepala dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah, kepala yayasan, dan guru sekolah luar biasa di Kabupaten Tobasa dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki peranan dalam mengembangkan atau mempengaruhi pandangan tentang penyandang disabilitas dan pendidikannya di tengah-tengah masyarakat.

### **3. Pendidikan**

Dalam penelitian ini, pengertian pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya karena hanya manusia



yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia (Sa'ud & Makmun, 2005: 6).

#### **4. Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami hambatan yang terkait dengan keberfungsian tumbuh kembangnya juga seseorang yang mengalami hambatan yang terjadi akibat interaksi antara dia dengan masyarakat dan lingkungannya.